



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Nunukan**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis ke arah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nunukan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan

Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang fleksibel, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai tantangan yang pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, sehingga mampu mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kependudukan seperti pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pengendalian penduduk komuter, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kependudukan.

Perencanaan Strategis pada dasarnya merupakan langkah awal serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun bersama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan strategis seperti kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) dan faktor-faktor sumber daya (resources) serta karakteristik kabupaten Nunukan.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Renja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan (strategis) regional dan nasional serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.



Renja juga merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkait pula dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan terlegitimasi.

Urgensinya renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dikarenakan pada dasarnya renja mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program analisis dan mobilisasi sumberdaya;
2. sebagai media untuk mengkomunikasikan tujuan, visi, program dan kebutuhan sumberdaya dengan mitra kerja (*stakeholder*) ;
3. untuk menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumberdaya dalam melaksanakan analisis dan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
4. sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan; dan
5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

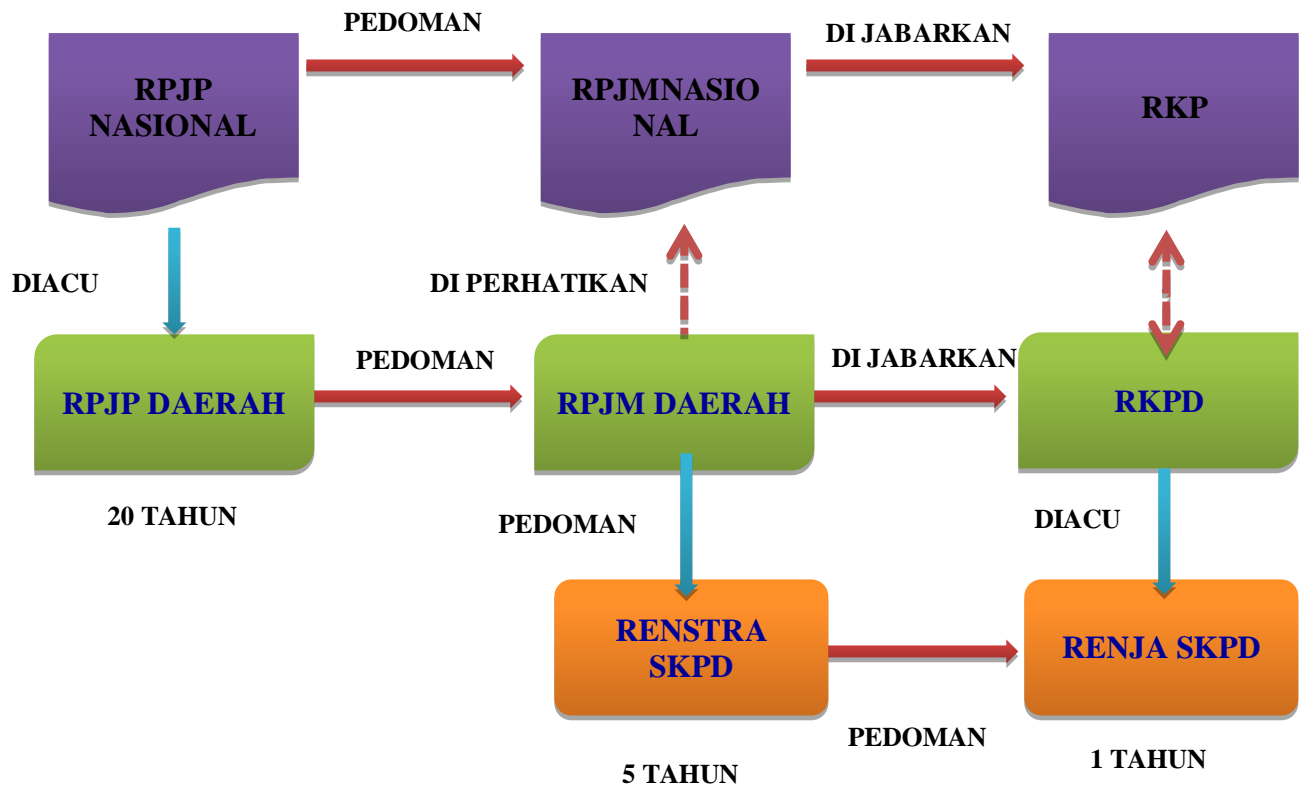
Renja dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan di bidang Kependudukan.

Penyusunan renja ini telah melalui beberapa proses dari mulai persiapan hingga penetapannya yang melibatkan seluruh pimpinan unit atau Kepala Seksi/Sub Bagian yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Proses awalnya adalah dengan melakukan analisa terhadap isu-isu strategis dari masing-masing seksi sampai menghasilkan harapan yang ingin dicapai dari setiap seksi yang pada akhirnya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan. Proses penyusunan ini awalnya dilakukan oleh masing-masing seksi. Hal ini ditempuh mengingat dikarenakan karakteristik antar unit kerja yang ada sangat berbeda dan sangat jarang berhubungan langsung antar satu dengan yang lainnya.

Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021 -2026 & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026. dan selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang dibuat setiap tahunnya



## KETERKAITAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA



### 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Administrasi Kependudukan;
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kabupaten Nunukan tahun 2023 dimaksudkan sebagai dasar dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 1 (Satu) tahun mendatang.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan .**

#### **BAB II            EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan pengukuran , evaluasi kinerja digunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja tersebut didefinisikan sebagai alat yang berfungsi untuk mengukur capaian hasil suatu program/ kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang dapat mengidentifikasi potensi-potensi atau permasalahan yang ada sebagai bahan

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja kedepannya. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan analisa atas pencapaian sasaran- sasaran dan indikator tersebut. Hasil capaian dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

#### 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

##### a) Prosentase Akurasi Data Kependudukan Kabupaten Nunukan

Indikator ini berupaya untuk memberikan gambaran dimana jumlah penduduk yang terdata atau terekam hasil data konsolidasi bersih dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terdata atau terekam hasil pelayanan SIAK.

$$= \frac{\text{jml ppdk yg terekam hasil dkb}}{\text{Jumlah Pddk terekam hasil SIAK}} \times 100$$

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase akurasi data kependudukan pada tahun 2021 sebesar 97,47 %, dari target

100 % atau capaiannya sebesar 97,47 %. Realisasi jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang terdata atau terekam dari hasil pelayanan SIAK yaitu 199.166 jiwa jumlah penduduk hasil data konsolidasi bersih (dkb) sebanyak 194.119 jiwa atau sebesar 97,47 % .





b) Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) merupakan perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP el dengan Jumlah penduduk wajib KTP.

$$= \frac{\text{jml ppdk KTP bernik yang diterbitkan}}{\text{Jumlaajib KTP}} \times 100$$

Pada tahun 2021 target Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP- el) adalah 100 % dari jumlah penduduk wajib KTP-el 131.615 jiwa. Realisasi jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el adalah 129.847 jiwa atau 98.66%. Dengan demikian capaian kinerja cakupan kepemilikan KTP el untuk tahun 2021 adalah 98,66 % (**Sangat Berhasil**)

c) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Anak Usia 0 – 18 th)

Cakupan kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0 – 18 th) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 th dengan jumlah anak usia 0 – 18 th pada tahun 2021.

$$= \frac{\text{jml ppdk usia 0 – 18th yg memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Pddk usia 0 – 18 th}} \times 100$$

Ditahun ini target cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0 – 18 th adalah 100 % dari jumlah anak 0 – 18 th. Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2021 adalah 67.195 jiwa sedangkan jumlah anak (0 - 18th) yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2021 adalah 64.782. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 – 18 th) pada tahun 2021 adalah 96,41 % dengan demikian capaian kinerja indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran anak (anak usia 0 – 18 th) adalah 96,41% (**Sangat Berhasil**)

d) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Cakupan kepemilikan kartu keluarga merupakan indikator kinerja yang menggambarkan perbandingan antara jumlah akumulasi kartu keluarga (KK) yang diterbitkan sampai dengan pada tahun 2021 dengan jumlah akumulasi kepala keluarga sampai dengan tahun 2021.

$$= \frac{\text{jml penerbitan KK sd tahun 2021}}{\text{Jumlaajib KTP Jml KK sd Tahun 2021}} \times 100$$

Pada tahun 2021 target indikator cakupan penerbitan kartu keluarga adalah 100% Realisasi penerbitan kartu keluarga pada tahun 2021 adalah 113.420 lembar kartu keluarga sedangkan jumlah kepala keluarga sampai dengan tahun 2021 adalah 63.490 lembar atau 178,64 % dengan demikian capaian kinerja indikator penerbitan kartu keluarga pada tahun 2021 adalah 178,64 % (**Sangat Berhasil**)



e) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan jumlah kematian yang terjadi pada tahun 2021.

$$= \frac{\text{jml penerbitan akta kematian th n}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yg terjadi}} \times 100$$

Pada tahun 2021 target indikator cakupan penerbitan akta kematian adalah 100 % dari jumlah kematian yang terjadi yaitu 534 jiwa. Realisasi penerbitan kutipan akta kematian adalah 534 lembar kutipan akta kematian. Ini berarti capaian kinerja indikator cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2021 adalah 100 % (*Sangat Berhasil*)

f) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara kutipan akta perkawinan (non muslim) yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan jumlah perkawinan yang terjadi pada tahun 2021.

$$= \frac{\text{jml penerbitan akta perkawinan th n}}{\text{Jml peristiwa perkawinan yg terjadi}} \times 100$$

Pada tahun 2021 target indikator cakupan penerbitan akta perkawinan adalah 100 % dari jumlah perkawinan yang terjadi yaitu 542 pasangan. Realisasi penerbitan kutipan akta perkawinan adalah 542 lembar kutipan akta perkawinan. Ini berarti capaian kinerja indikator cakupan penerbitan akta perkawinan pada tahun 2021 adalah 100 % (*Sangat Berhasil*)

g) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini diperoleh dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Target nilai IKM pada tahun 2021 adalah 90, dari hasil survey yang dilaksanakan pada tahun 2021 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 87,89. (*Sangat Baik*)



Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan database kependudukan Kabupaten Nunukan sebagai dasar penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Presentase Akurasi Data Kependudukan Kab Nunukan	95 %	100 %	107,43	97,47	113	97,47
		Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	90 %	100 %	98,43	98,66	109,36	98,66
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	90 %	100 %	156,15	96,41	173,50	96,41
		Cakupan Penerbitan KK	85 %	100 %	148	178,64	174	178,64
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	100 %	100	100	100	100
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100	100%	100	100	100	100
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90	87,09	87,89	102,44	97,66





Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase Akurasi Data Kependudukan Kabupaten Nunukan	80%	85%	90%	95%	100%	81.91%	98.55	82,70	107,43		102.39%	116%	91,88	113,00	
	Cakupan Kepemilikan KTP el	70%	75%	88%	90%	100%	84.61%	94.31	97,19	98,43		120.87%	126%	111,78	109,36	
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Anak Usia 0 – 18 th) (IKU)	75%	80%	80%	90%	100%	82.39%	138.53	92,72	156,15		109.85%	173%	116	173,50	
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	85%	87%	80%	85%	100%	86.39%	100	100	148		107.98 %	115%	111,11	174,00	
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100		100%	100%	100	100,00	
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100		100%	100%	100	100,00	
	Nilai IKM SKPD	-	-	80	81	82			83,36	87,09					102,44	





### 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada point-point sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis . Isu – isu strategis ditentukan dengan metode Forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh Pejabat struktural yang membidangi teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAbupaten Nunukan, kemudian merumuskan isu – isu strategis yang telah dianalisa dan memiliki korelasi dengan permasalahan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka ditentukan isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan oleh DKPS
2. Belum optimalnya akses Informasi tentang Administrasi Kependudukan;
3. Masyarakat daerah pedalaman dan terisolir sulit mendapatkan pelayanan Adminduk;
4. Belum optimalnya Penyajian data kependudukan;
5. Belum optimalnya Pemanfaatan data kependudukan; dan
6. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 27  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan 2023  
Dinas Kependudukan dan Ppencatatan sipil

Program / Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Catatan penting
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.434.321.464		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.434.321.464		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	68,50 Nilai	5.094.253.560		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	68,50 Nilai	5.094.253.560		
<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	3 Dokumen	71.370.705		<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	3 Dokumen	71.370.705		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.803.094		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.803.094		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	28.567.611		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	28.567.611		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000		
<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 Unit	3.568.459.077		<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 Unit	3.568.459.077		





Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Org	3.568.459.077	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Org	3.568.459.077		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Keg			0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Keg			0		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	Unit	542.827.378	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	Unit	542.827.378		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Jenis	5.291.913	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Jenis	5.291.913		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Unit	130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Unit	130.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	251.220.445	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	251.220.445		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.315.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.315.020		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	150.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	Unit	738.756.080	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	Unit	738.756.080		



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.060.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.060.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	310.696.080		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	310.696.080		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	425.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	425.000.000		
<b><u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD			137.840.320		<b><u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD			137.840.320		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	71.110.320		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	71.110.320		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Item	11.730.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Item	11.730.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	55.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	55.000.000		
<b><u>Penataan Organisasi</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal			35.000.000		<b><u>Penataan Organisasi</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal			35.000.000		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	35.000.000		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	35.000.000		



<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Kepemilikan KTP el	99%	%	494.400.000		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Kepemilikan KTP el	99%	%	494.400.000		
	Persentase Anak yg Memiliki KIA	55%	%				Persentase Anak yg Memiliki KIA	55%	%			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4	Jenis	370.800.000		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4	Jenis	370.800.000		
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5	Dokumen	77.250.000		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5	Dokumen	77.250.000		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	#####	Dokumen	200.000.000		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	#### #	Dokumen	200.000.000		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	Laporan	93.550.000		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	Laporan	93.550.000		
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000		
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5	Jenis	46.350.000		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5	Jenis	46.350.000		
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	Laporan	46.350.000		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	Laporan	46.350.000		
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	46.350.000		



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000		
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	30.900.000		
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase Anak 0 - 18 Th yg memiliki Akta Kelahiran	95	%	499.550.000	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase Anak 0 - 18 Th yg memiliki Akta Kelahiran	95	%	499.550.000		
	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100	%			Persentase Penerbitan Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100	%			
	Persentase Penerbitan Akta Kematian atas peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	%			Persentase Penerbitan Akta Kematian atas peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	%			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4	Jenis	293.550.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4	Jenis	293.550.000		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	200.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	Dokumen	200.000.000		
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	21	Laporan	93.550.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	21	Laporan	93.550.000		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencapil	1	Laporan	175.100.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencapil	1	Laporan	175.100.000		



Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2	Laporan	26.050.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2	Laporan	26.050.000		
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2	Laporan	10.000.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2	Laporan	10.000.000		
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	Laporan	36.050.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	Laporan	36.050.000		
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000		
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	Laporan	46.350.000		



Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	Dokumen	10.300.000		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	Dokumen	10.300.000			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000			
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	30.900.000			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Adminduk melalui PKS	5	OPD	319.300.000		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Adminduk melalui PKS	5	OPD	319.300.000			
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan yang akurat	1	Laporan	92.700.000		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan yang akurat	1	Laporan	92.700.000			
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	Dokumen	46.350.000		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1	Dokumen	46.350.000			
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	OPD	46.350.000		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	OPD	46.350.000			
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan				
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	1	Laporan	-		<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	1	Laporan	-			



Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	1	Laporan	180.250.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	1	Laporan	180.250.000		
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	41.200.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	41.200.000		
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	Dokumen	46.350.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5	Dokumen	46.350.000		
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	92.700.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	92.700.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	21	Unit	46.350.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	21	Unit	46.350.000,00		
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	46.350.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	46.350.000		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Penyajian Data Penduduk Tk KAbupaten	100	%	26.817.904	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Penyajian Data Penduduk Tk KAbupaten	100	%	26.817.904		
Penyusunan Profil Kependudukan	Jml Dokumen Profil Kependudukan	1%	Dokumen	26.817.904	Penyusunan Profil Kependudukan	Jml Dokumen Profil Kependudukan	1%	Dokumen	26.817.904		
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	35	Buku	26.817.904	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	35	Buku	26.817.904		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan  
Hasil Musrenbang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	-	-	-	-	-



**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukan penelaahan pada Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, tujuannya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

No	Sasaran Renstra KL Ditjen Dukcapil	Sasaran Renstra DKPS Prov Kaltara	Sasaran Renstra DKPS Kab Nunukan
1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ketersediaan data Adminduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat</li> <li>• Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dengan perjanjian kerjasama</li> </ul>
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik		

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berikut merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara beserta indikator kinerjanya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2022
1.	Mengoptimalkan Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan kepada Masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi Kependudukan	87,5%



		1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92%
		2 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh OPD di Lingk PemDa Kab Nnk	persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	20%
		3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Predikat SAKIP PD	B

### 3.3 Program dan Kegiatan

Adapun program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan Pada tahun 2023 sesuai dengan Permendagri 050\_5889 Tahun 2021 terdiri dari 5 program dan 16 kegiatan serta 38 Sub Kegiatan sebagai berikut :



## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.193.544.102	DAU	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Kab Nnk	68,50	4.954.857.302	DAU	
<b><u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u></b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kab Nnk	5 Dok	31.763.600	DAU	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Nnk	3 dok	19.433.200	DAU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Nnk	2 dok	12.330.400	DAU	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Nnk		-		
<b><u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		1 unit	3.568.459.077	DAU	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Nnk	35 org	3.568.459.077	DAU	



<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		1 unit	541.703.554	DAU	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Nnk	10 Jenis	5.291.913	DAU	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Nnk	3 Unit	204.000.000	DAU	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Nnk	3 Paket	251.220.445	DAU	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Nnk	5 Paket	6.191.196	DAU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Nnk	20 Lap	75.000.000	DAU	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD			0		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang disediakan					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang disediakan					
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan					
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dibangun					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun					



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun					
<b><u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang		1 unit	723.479.571		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000	DAU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Nnk	12 Lap	299.474.000	DAU	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Nnk	12 Lap	421.005.571	DAU	
<b><u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD		7 unit	85.490.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Nnk	7 unit	48.990.000	DAU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Nnk		11.500.000	DAU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nnk	1 unit	25.000.000	DAU	
<b><u>Penataan Organisasi</u></b>	Jumlah Unit Kerja Internal		1 unit	3.961.500		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Nnk	4 Lap	3.961.500	DAU	



<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Kepemilikan KTP el		97%	417.650.000		
	Persentase Anak yg Memiliki KIA		45%			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan		4 Jenis	297.650.000		
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Nnk	5 Dok	12.650.000	DAU	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Nnk	251407	200.000.000	DAU	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Nnk	3 Lap	85.000.000	DAU	
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Penataan Pendaftaran Penduduk		1 Lap	45.000.000	DAU	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Nnk	5 Jenis	45.000.000	DAU	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		1 Lap	45.000.000	DAU	
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Nnk	1 Lap	45.000.000	DAU	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		1 Lap	30.000.000	DAU	
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Nnk	1 Lap	30.000.000	DAU	
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase Anak 0 - 18 Th yg memiliki Akta Kelahiran		92%	485.000.000	DAU	



	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan		100%			
	Persentase Penerbitan Akta Kematian atas peristiwa Kematian yang dilaporkan		100%			
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan		4 Jenis	285.000.000	DAU	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Nnk	5000 dok	200.000.000	DAU	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Nnk	21 Lap	85.000.000	DAU	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencapil		1 Laporan	170.000.000	DAU	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		2 Laporan	35.000.000	DAU	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota					



Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Nnk	2 Laporan	35.000.000	DAU	
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Nnk	1 Lap	45.000.000	DAU	
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Nnk	1 Lap	55.000.000	DAU	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Nnk				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1 Lap	30.000.000	DAU	
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Nnk	1 Lap	30.000.000	DAU	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Adminduk melalui PKS		5 OPD	310.000.000	DAU	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan yang akurat		1 Lap	90.000.000	DAU	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Nnk	1 Dok	45.000.000	DAU	
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Nnk	5 opd	45.000.000	DAU	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah					
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan					





Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun					
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel		5 dok	175.000.000	DAU	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Nnk	5 dok	45.000.000	DAU	
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri					
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Nnk	1 Lap	40.000.000	DAU	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Nnk	1 Lap	90.000.000	DAU	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi					



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan					
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Nnk	3 unit	45.000.000	DAU	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Nnk	50 org	45.000.000	DAU	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Penyajian Data Penduduk Tk KAbupaten	Kab. Nnk	100%	26.036.800	DAU	
Penyusunan Profil Kependudukan	Jml Dokumen Profil Kependudukan	Kab. Nnk	1 Dok	26.036.800	DAU	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Nnk	35 Buku	26.036.800	DAU	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini disusun sesuai dengan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistic dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan , aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan

Kepala   
  
**AGUSTINUS PALENTEK, SS**  
NIP. 19670606 200003 1 009